

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH JAWA TENGAH MELALUI MEDIA
INTERNET PERIODE 2021**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Devi Ainiyatul Hesti

Nim : 31401606350

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2023**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH JAWA TENGAH MELALUI MEDIA
INTERNET PERIODE 2021**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Devi Ainiyatul Hesti

Nim : 31401606350

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PUBLIKASI
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH JAWA
TENGAH MELALUI MEDIA INTERNET PERIODE 2021**

Disusun Oleh :

Devi Ainiyatul Hesti

Nim : 31401606350

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 22 Agustus 2023

Pembimbing



Hendri Setiawan

2023.08.22

11:46:25 +07'00'

Hendri Setiawan, S. E., M.PA.

NIK. 211406019

**FAKTOR-FAKOR YANG MEMPENGARUHI PUBLIKASI LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH JAWA TENGAH MELALUI
INTERNET PERIODE 2021**

Disusun Oleh :

Devi Ainiyatul Hesti

Nim : 31401606350

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 22 Agustus 2023

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Hendri Setiawan

2023.08.22

11:46:25 +07'00'

Hendri Setiawan, S.E., M.PA.

NIK. 211406019

Penguji I

Penguji II

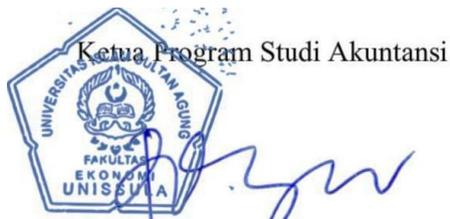
Provita Wijayanti, S.E., M.Si., AK., CA

Hani Werdi Aprianti, SE., M.Si, Ak., CA

NIK. 211403012

NIK. 211414026

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Tanggal 22 Agustus 2023



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., AK., CA

NIK. 211403012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Devi Ainiyatul Hesti
NIM : 31401606350
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH JAWA TENGAH MELALUI INTERNET PERIODE 2021”** merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur *Plagiarisme* dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam proposalriset ini.

Semarang, 5 September 2023

Yang membuat pernyataan



Devi Ainiyatul Hesti

NIM. 31401606350

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Ainiyatul Hesti
NIM : 31401606350
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat Asal : Ds. Jleper RT 04/RW 04 Kec.Mijen, Kab. Demak
No. HP/ Email : 08802962413 / deviainiyatulhesti97@gmail.com
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“FAKTOR-FAKOR YANG MEMPENGARUHI PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH JAWA TENGAH MELALUI INTERNET PERIODE 2021”** dan menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dikelola serta dipublikasikan di internet atau media lain. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini maka saya siap menerima sanksi secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 September 2023



Devi Ainiyatul Hesti

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”

(HR. Thabrani)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Kedua Orang Tua
- Keluarga Tercinta
- Sahabat serta teman-teman



ABSTRAK

Kajian ini berfokus pada publikasi laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui Internet dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pasca disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ 2012. Berkaitan dengan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Kelompok sasaranriset ini merupakan Provinsi Jawa Tengah, dan transparansi anggarannya dipublikasikan di situs resminya. Sebagai faktor (variabel independen) dipilih pendapat pemeriksa dan ukuran pemerintah daerah. Alat analisis yang digunakan merupakan regresi linier berganda yang diolah dengan software SPSS 27. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa opini audit mempunyai dampak negatif signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan ukuran pemerintah daerah mempunyai dampak positif dan signifikan. Berdampak signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah periode tahun 2021 dipublikasikan di Internet.

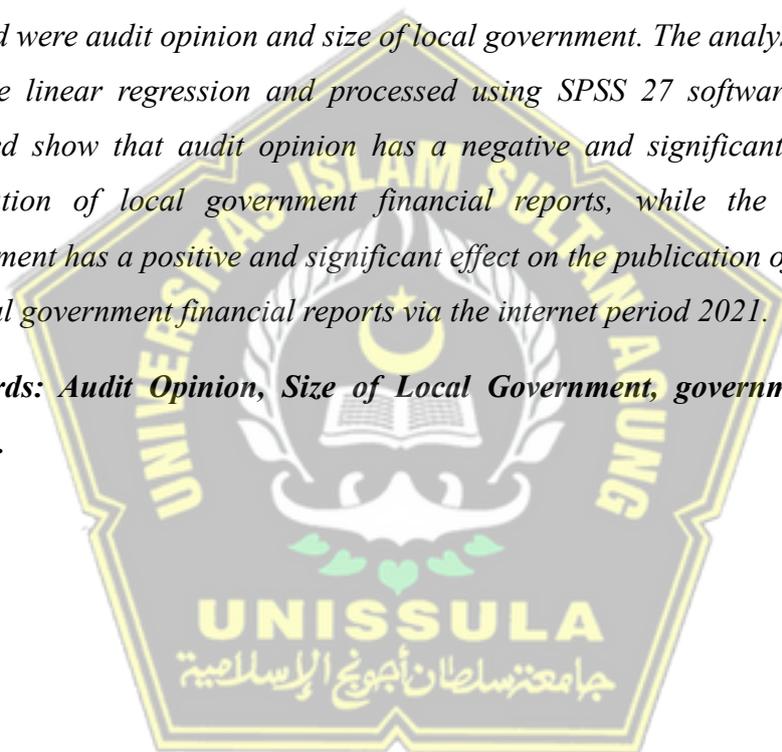
Kata Kunci: Opini Audit, Ukuran Pemda, Publikasi LKPD.



ABSTRACT

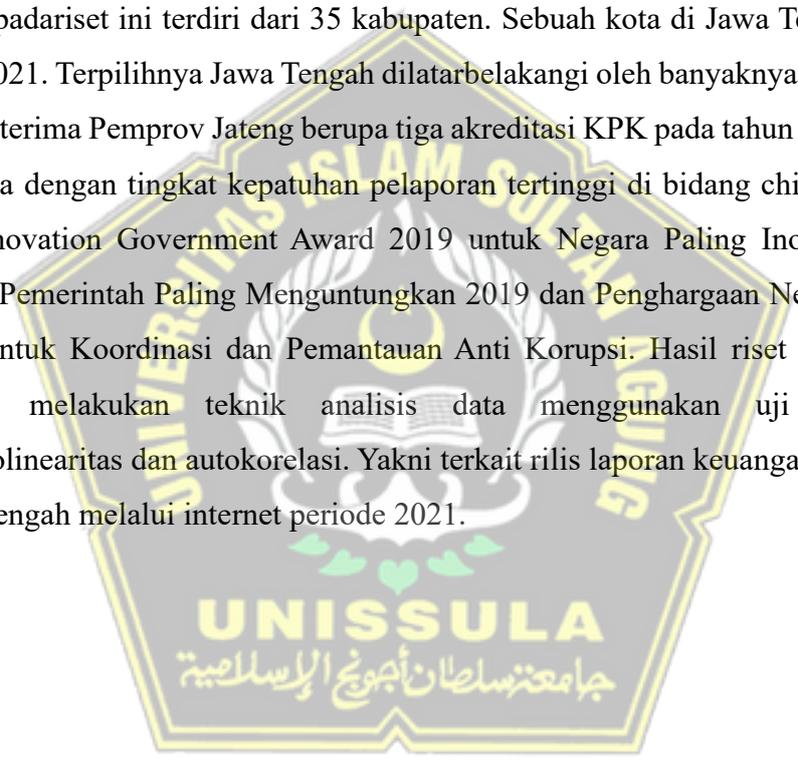
This research focuses on the publication of local government financial reports via the internet and the influencing factors after the emergence of the Public Information Disclosure Act and the Instruction of the Minister of Home Affairs No.188.52/1797/SJ of 2012, all of which are efforts to realize Good Government. The population selected in this study is the province of Central Java which publishes budget transparency on their official website. The factors (independent variables) selected were audit opinion and size of local government. The analysis tool used is multiple linear regression and processed using SPSS 27 software. The results obtained show that audit opinion has a negative and significant effect on the publication of local government financial reports, while the size of local government has a positive and significant effect on the publication of Central Java regional government financial reports via the internet period 2021.

Keywords: *Audit Opinion, Size of Local Government, government financial reports.*



INTISARI

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, tujuan laporan keuangan merupakan untuk memberikan informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan, membantu banyak penggunanya dalam mengambil keputusan keuangan. Ukuran kota merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan suatu kota. Ukuran suatu perusahaan dapat dipengaruhi dalam beberapa cara, termasuk total aset, rasio jangka panjang, dan lain-lain. Populasi per kapita padariset ini terdiri dari 35 kabupaten. Sebuah kota di Jawa Tengah. Tahun yaitu 2021. Terpilihnya Jawa Tengah dilatarbelakangi oleh banyaknya penghargaan yang diterima Pemprov Jateng berupa tiga akreditasi KPK pada tahun 2019 sebagai lembaga dengan tingkat kepatuhan pelaporan tertinggi di bidang chip. Pemenang 3rd Innovation Government Award 2019 untuk Negara Paling Inovatif, Badan Publik Pemerintah Paling Menguntungkan 2019 dan Penghargaan Negara Terbaik 2019 untuk Koordinasi dan Pemantauan Anti Korupsi. Hasil riset ini diperoleh setelah melakukan teknik analisis data menggunakan uji normalitas, multikolinearitas dan autokorelasi. Yakni terkait rilis laporan keuangan pemerintah Jawa Tengah melalui internet periode 2021.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah Melalui Internet Periode 2021”.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Heru Sulisty, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si, AK, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Hendri Setiawan, S.E., M.PA. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Kedua Orang tua tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan kasih sayang yang tak ternilai bagi penulis.
6. Sahabat dan teman-teman penulis yang sudah memberikan semangat dan dukungan Selama penulis mengerjakan skripsi.
7. Rekan-rekan mahasiswa khususnya Program Studi S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Semua Pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan riset ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun berkat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan riset ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 5 September 2023



Devi Ainiyatul Hesti



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
INTISARI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Riset.....	5
1.4 Manfaat Riset.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Teori Institusional.....	7
2.2 Laporan Keuangan.....	7
2.3 Faktor Faktor yang Mempengaruhi Publikasi Laporan Keuangan 10	
2.3.1 Opini Audit.....	10
2.3.2 Ukuran Pemerintah Daerah.....	10
2.4 Media Internet.....	11
2.5 Pemerintah Daerah.....	13
2.6 Penelitian Terdahulu.....	15
2.7 Hipotesis Riset.....	18

2.7.1 Pengaruh Opini Audit Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	18
2.7.2 Pengaruh Ukuran Pemda Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	18
2.8 Kerangka Berpikir	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	20
3.1 Jenis riset	20
3.2 Populasi dan Sampel riset.....	20
3.3 Jenis Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data	20
3.4 Definisi Operasional.....	20
3.5 Prosedur Pengumpulan Data	21
3.6 Teknik Analisis Data.....	22
BAB IV HASIL RISET DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	27
4.2 Analisis Data	28
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	28
4.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	29
4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda	32
4.3.3 Uji Hipotesis	33
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	36
4.3.1 Pengaruh Opini Audit Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	36
4.3.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	37
BAB V PENUTUP.....	39
5.1 Simpulan.....	39
5.2 Implikasi.....	39
5.3 Keterbatasan Penelitian	40
5.4 Agendariset Mendatang.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	42
LAMPIRAN.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian 19



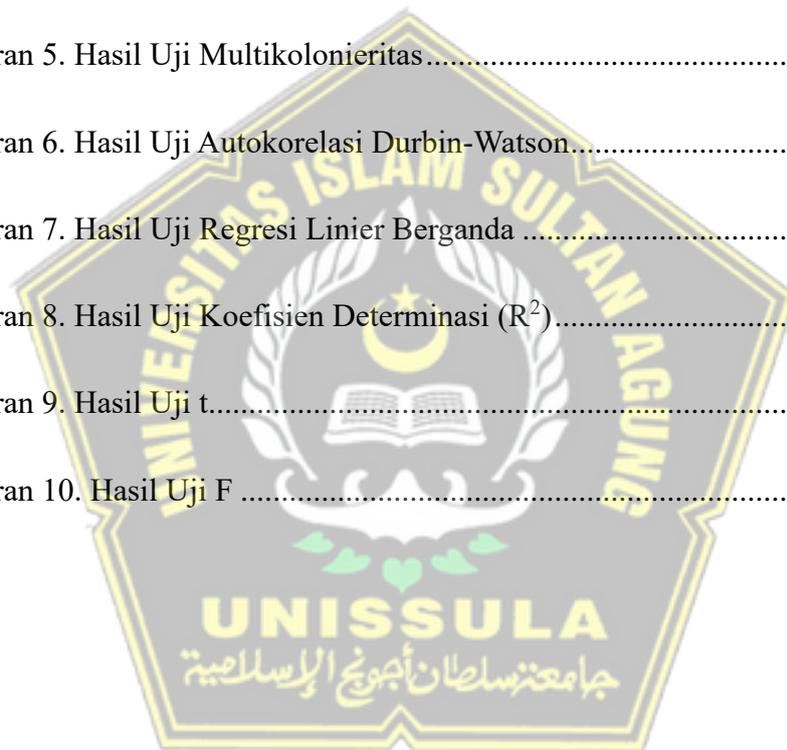
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.riset Terdahulu	15
Tabel 4. 1 Daftar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	27
Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	29
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	30
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolonieritas.....	31
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson.....	32
Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	33
Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	34
Tabel 4. 8 Hasil Uji F	35
Tabel 4. 9 Hasil Uji T.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Sampel.....	46
Lampiran 2. Tabulasi Data	47
Lampiran 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	48
Lampiran 4. Hasil Uji Normalitas Kolmogotov Smirnov	48
Lampiran 5. Hasil Uji Multikolonieritas.....	48
Lampiran 6. Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson.....	49
Lampiran 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda	49
Lampiran 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	49
Lampiran 9. Hasil Uji t.....	49
Lampiran 10. Hasil Uji F	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi dibagi atas kabupaten ataupun kota yang terdiri dari kecamatan serta kelurahan ataupun desa dibawahnya. Tiap wilayah provinsi, kabupaten, serta kota memiliki pemerintahan wilayah serta diresmikan dengan undang-undang dalam melakukan seluruh gunanya di wilayah tersebut.

Bagi Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan wilayah mengartikan provinsi, kabupaten/kota selaku wilayah otonom, maksudnya wilayah memiliki kekuasaan buat mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan warga bersumber pada aspirasi rakyat dalam negeri kesatuan. sistem Negeri Kesatuan Republik Indonesia.

Diharapkan dengan terdapatnya otonomi wilayah hingga wilayah bisa mewujudkan pembangunannya sendiri serta mewujudkan kemampuan yang terdapat di daerahnya buat menggapai kebahagiaan warga Penyelenggaraan otonomi wilayah didasarkan pada Ketetapan MPR No XV/MPR/1998 dengan tujuan desentralisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah wilayah Diantara usaha buat mendesak terciptanya prinsip keterbukaan serta transparansi merupakan melaksanakan e-Government serta publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Wilayah (LKPD) di internet Paragraf 9 Statment Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 menarangkan kalau laporan keuangan pemerintah memiliki tujuan spesial buat sediakan data yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan serta mencerminkan akuntabilitas. Atensi terhadap transparansi di Indonesia diisyarati

dengan diberlakukannya UU Nomor Keputusan Menteri Data serta Komunikasi Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Data Publik. Pasal 9 ayat UU KIP mengendalikan kalau data publik semacam data keuangan wajib di informasikan lewat media yang gampang diakses oleh warga serta dengan bahasa yang tidak susah dimengerti Hasilnya, pemerintah wilayah bisa menggunakan Internet selaku fasilitas penyebaran data yang dialami kilat serta real-time..

Sebaliknya tren pemasukan asli wilayah bertambah dari 9,900 milyar pada tahun 2014 jadi 12,500 milyar pada tahun 2018. Perihal seragam pula terjalin pada tren pemberitaan tentang LKPD di web pemerintah wilayah Dari 35 pemerintah wilayah di Jawa Tengah, 15 pemerintah wilayah sudah menerbitkan LKPD di Internet pada tahun 2014. Pada tahun 2015, jumlah tersebut bertambah jadi 18 pemerintah wilayah serta jadi 24 pemerintah wilayah pada tahun 2018. Skor paling tinggi sebesar 99,15 dipunyai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disusul oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,07 serta Jawa Barat sebesar 98,15 pada tahun 2018. Provinsi Jawa Tengah sudah menggapai prestasi terpaut keterbukaan data pada tahun 2018 serta 2020.

Pada tahun 2018, 17 pemerintah kabupaten/kota tersebut terkategori sangat informatif, informatif, berorientasi data serta lumayan informatif. Sebaliknya pada tahun 2020, ada 19 pemerintah kabupaten/kota yang terkategori kalimat data serta penerangan. Bersumber pada penjelasan tersebut, periset mau melaksanakan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi serta yang berkaitan dengan publikasi laporan keuangan pemerintah wilayah jawa tengah melalui internet yang ada pada web formal pemerintah wilayah kabupaten/kota di

provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun anggaran 2021. Negara-negara dibagi menjadi kabupaten atau kota, yang terdiri dari kecamatan dan kelurahan atau desa di bawahnya. Setiap negara bagian, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan lokal, yang diwajibkan oleh undang-undang untuk melaksanakan semua tugas di wilayahnya.

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014, provinsi, kabupaten/kota diartikan sebagai daerah otonom, artinya daerah mempunyai kekuasaan untuk mengurus dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat menurut keinginan rakyat. Maksudku bangsa tunggal. Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya otonomi daerah diharapkan daerah dapat mewujudkan pembangunannya sendiri dan mewujudkan kebahagiaan warganya dengan memanfaatkan kemampuan yang ada pada daerahnya. Perwujudan otonomi daerah berdasarkan Ketetapan MPR Nomor 1. Melalui keterbukaan dan transparansi, pihaknya memperkenalkan e-Government dan menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di internet. Bagian 9 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat mempunyai tujuan tertentu: untuk menyediakan data yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk mencerminkan akuntabilitas. Ketertarikan terhadap transparansi di Indonesia ditunjukkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Data Publik oleh Menteri Data dan Komunikasi Republik Indonesia. Pasal 9 UU KIP mewajibkan data publik,

seperti data keuangan, harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Sementara itu, tren pendapatan pokok kawasan meningkat dari 9,9 triliun pada tahun 2014 menjadi 12,5 triliun pada tahun 2018. Konsistensi juga berkaitan dengan tren pelaporan LKPD di website pemerintah daerah. Dari 35 pemerintah daerah di Jawa Tengah, 15 pemerintah daerah menerbitkan LKPD di Internet pada tahun 2014. Pada tahun 2015 jumlah ini meningkat menjadi 18 kotamadya dan pada tahun 2018 menjadi 24 kotamadya. Perolehan nilai tertinggi merupakan Pemprov Jawa Tengah dengan nilai 99,15, disusul Pemprov DKI Jakarta dengan nilai 99,07, dan Jawa Barat dengan nilai 98,15 pada tahun 2018. Provinsi Jawa Tengah mendapat skor kinerja keterbukaan data pada tahun 2018 dan 2020.

Pada tahun 2018, terdapat 17 pemerintah kabupaten/kota yang mendapat peringkat sangat menguntungkan, menguntungkan, berorientasi data, dan cukup menguntungkan. Sebaliknya, pada tahun 2020 terdapat 19 pemerintah kabupaten/kota yang dikategorikan sebagai kumpulan data dan informasi. Berdasarkan pernyataan tersebut maka peneliti akan mempengaruhi dan berhubungan dengan publikasi laporan keuangan pemerintah provinsi jawa tengah melalui internet pada website resmi pemerintah provinsi kabupaten/kota jawa tengah. . Jawa sepanjang tahun anggaran 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar balik yang sudah dipaparkan, hingga kasus yang hendak diteliti ialah :

1. Apa saja aspek aspek yang pengaruhi publikasi laporan keuangan pemerintah wilayah jawa tengah lewat media internet pada periode 2021?
2. Bagaimana ikatan antar aspek dalam pengaruhi publikasi laporan keuangan pemerintah wilayah jawa tengah lewat media internet pada periode 2021?

1.3 Tujuan Riset

Berdasarkan latar balik yang sudah dipaparkan, hingga tujuan dari riset ini merupakan :

1. Mengetahui aspek aspek yang pengaruhi publikasi laporan keuangan pemerintah wilayah jawa tengah lewat media internet pada periode 2021.
2. Mengatahui ikatan antar aspek dalam pengaruhi publikasi laporan keuangan pemerintah wilayah jawa tengah lewat media internet pada periode 2021.

1.4 Manfaat Riset

Khasiat yang diharapkan bisa diperoleh dari riset ini merupakan selaku berikut:

1. Manfaat Teoritis

Khasiat dari riset ini buat pengembangan ilmu merupakan meningkatkan pengetahuan di bidang publikasi laporan keuangan

pemerintah wilayah jawa tengah lewat media internet pada periode 2021.

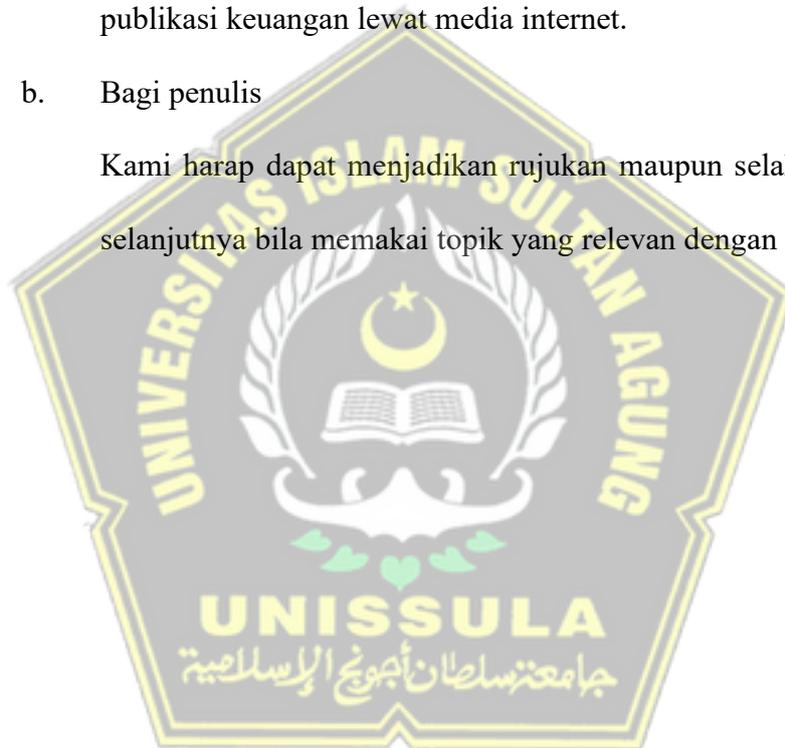
2. Manfaat Instan

a. Bagi Pemerintah Wilayah

Riset ini bisa dijadikan selaku bahan pertimbangan dalam serta diharapkan bisa jadi rujukan serta masukan dalam merumuskan publikasi keuangan lewat media internet.

b. Bagi penulis

Kami harap dapat menjadikan rujukan maupun selaku acuan riset selanjutnya bila memakai topik yang relevan dengan riset ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Institusional

Teori Institusional Bagi Berdasarkan Meyer serta Rowan, DiMaggio serta Powell, teori institusional merupakan teori yang menarangkan gimana organisasi merespons tekanan dari konteks institusionalnya. Wujud umpan balik yang diberikan merupakan pelaksanaan struktur serta aplikasi manajemen selaku opsi oleh organisasi yang dikira pas serta bisa diterima secara sosial buat memperoleh legitimasi dari konteks kelembagaan sesuatu organisasi.

Bagi Berdasarkan Ratmono, pelaporan keuangan lewat web formal oleh pemerintah wilayah bisa dilihat selaku wujud aplikasi hukum serta penerimaan sosial guna menggapai legitimasi ataupun pengakuan dari konteks kelembagaan pemerintah wilayah ialah warga Pemerintah pusat serta organisasi yang lain (Ratmono, 2013).

2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lainnya, serta lampiran-lampiran yang merupakan bagian dari laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan yang berasal dari Institut Akuntansi Indonesia ini merupakan untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan industri, kinerja dan situasi keuangan untuk membantu pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

Berbeda dengan narasumber Khadijah Febriana, tujuan umum laporan keuangan merupakan memberikan informasi dan menjelaskan keadaan keuangan. Secara garis besar, tujuan laporan keuangan merupakan untuk:

- a. Mengetahui keadaan organisasi tanpa harus berada di lokasi.
- b. Memahami kondisi keuangan organisasi dan hasil operasinya.
- c. Prediksi kondisi keuangan organisasi di masa depa
- d. Pertimbangkan kemungkinan terjadinya dampak atau insiden dalam organisasi Anda. e.Evaluasi dan evaluasi kinerja organisasi.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2007) mengemukakan bahwa karakteristik kualitatif merupakan karakteristik yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan berguna bagi penggunanya. Ada empat karakteristik kualitas utama. Hal ini dapat dimengerti, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2007) melaporkan bahwa ciri-ciri kualitatif merupakan ciri pembeda yang menjadikan data dalam laporan keuangan berguna bagi penggunanya. Kualitas memiliki empat karakteristik utama: pemahaman, relevansi, keandalan, dan komparabilitas.

- a. Dapat Dipahami

Berkualitas berarti informasi yang terkandung dalam laporan keuangan cukup sederhana sehingga dapat cepat dipahami oleh penggunanya. Untuk tujuan ini, pengguna diharuskan memiliki pengetahuan yang memadai di

bidang ekonomi, kegiatan bisnis, dan akuntansi, serta menanggapi informasi dengan serius.

b. Relevansi

Agar informasi bermanfaat, informasi tersebut harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi dianggap relevan jika dapat membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, saat ini, atau masa depan, mengonfirmasi atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna sebelumnya, dan memengaruhi keputusan keuangan pengguna. Saya punya.

c. Keandalan

Agar informasi bermanfaat, informasi tersebut harus dapat diandalkan. Informasi mempunyai kualitas yang dapat diandalkan jika bebas dari representasi yang menyesatkan atau kesalahan material dan dapat dipercaya untuk secara akurat mewakili apa yang seharusnya disajikan dan diharapkan oleh pengguna informasi.

d. Setara

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan industri dari periode waktu yang berbeda untuk mengidentifikasi tren kesehatan dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, pengukuran dan pelaporan dampak finansial dari transaksi dan peristiwa pemersatu lainnya harus selalu dilakukan lintas industri, industri, dan industri lainnya..

2.3 Faktor Faktor yang Mempengaruhi Publikasi Laporan Keuangan

Dalam riset ini, pengamat mengajukan dua aspek yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan industri, yaitu opini audit dan ukuran pemerintahan.

2.3.1 Opini Audit

Dalam hal ini, kami bertujuan untuk menghapus pengungkapan yang lebih luas dari LKPD. Ini merupakan cara untuk mencapai legitimasi sosial. BPK mengkaji setiap LKPD dan memberikan hasil akhir sebagai opini pemeriksaan. Variabel opini pemeriksaan BPK diukur dengan memberikan nilai ordinal sebagai berikut:

- a. Skor 5 untuk opini wajar tanpa pengecualian.
- b. Skor 4 untuk komentar yang diterima sepenuhnya dengan paragraf penjelasan
- c. Skor 3 untuk pendapat otoritatif.
- d. Skor 2 tentang komentar yang tidak adil
- e. Skor 1 untuk komentar Tidak ada komentar

2.3.2 Ukuran Pemerintah Daerah

Dimensi pemerintah wilayah ialah skala yang bisa diklasifikasikan bagi berdasarkan besar kecilnya sesuatu industri yang didefinisikan dengan bermacam metode ialah total peninggalan dimensi jangka panjang serta lain-lain. Besar kecilnya pemerintahan wilayah merupakan besar kecilnya pemerintahan wilayah yang tercermin dari banyaknya kekayaan yang dimiliki Fakta diperoleh dari riset terdahulu menimpa apakah besar kecilnya sesuatu pemerintahan wilayah berhubungan dengan keterbukaan data keuangan wilayah lewat internet pada web formal pemerintah wilayah Bagi Berdasarkan riset Medina, besar kecilnya sesuatu pemerintah wilayah berbanding lurus dengan ketersediaan serta aksesibilitas data keuangan di web formal pemerintah wilayah Hasil uji Gaya serta Tennyson

membagikan akibat positif terhadap ketersediaan serta aksesibilitas data keuangan pemerintah wilayah di Internet. Kenyataannya perihal ini membagikan fakta empiris kalau dimensi pemerintah wilayah tidak memiliki akibat yang signifikan terhadap transparansi pemerintah wilayah

2.4 Media Internet

Secara teknis media internet merupakan media telekomunikasi serta multimedia. Contoh media online antara lain portal, web TELEVISI online, radio online, serta email. Media internet diucap pula dengan media jaringan sebab metode bekerja serta mengakses data senantiasa memakai media internet. Dari sudut pandang riset media ataupun komunikasi massa, media online tercantum dalam objek riset teori “media baru”.

Definisi media baru merupakan sebutan yang mengacu pada jalan buat mengakses konten kapan saja, di mana saja, di fitur digital apa juga dan umpan balik pengguna yang kreatif serta interaktif, partisipasi dan pelatihan komunitas seputar konten media, dan aspek-aspek dari media tersebut. "nyata". generasi waktu. Karakteristik sekalian keunggulan media internet di bandingkan “media konvensional” (cetak/elektronik) ataupun lebih diketahui dengan karakteristik jurnalistik online, antara lain:

a. Multimedia

Dapat muat ataupun menyajikan berita/informasi dalam wujud yang bermacam-macam dalam suatu konten berbentuk bacaan audio, video, grafis, serta foto secara bertepatan seiring

b. Aktualitas

Kabar yang disajikan benar-benar nyata dari apa yang terjalin pada peristiwa.

c. Cepat

Begitu kabar selesai diupload, seluruh orang langsung dapat mengaksesnya.

d. Update

Apabila terdapat kesalahan dari sisi konten ataupun redaksional data bisa diperbaruhi (updating) dengan kilat misalnya kesalahan ketik/ejaan. Dalam media online sebutan ralat belum sempat ditemukan sebagaimana di media cetak yang kerap timbul Sebab Data di informasikan secara terus menerus.

e. Kapasitas luas

Tidak semacam koran majalah yang terbatas oleh kertas, taman website bisa menampung ratusan apalagi ribuan kata dalam satu konten kabar

f. Fleksibilitas

Tanpanya terdapat batasan ruang serta waktu pemuatan serta editing naskah bisa dicoba kapanpun serta dimanapun, sampai agenda terbitpun pembaharuan dapat dicoba tiap dikala

g. Luas

Menjangkau segala dunia selagi masih dijangkau jaringan internet.

h. Terdokumentasi

Data tersimpan di “bank informasi (arsip) serta bisa ditemui lewat “link”, postingan terpaut serta sarana “cari” (search).

2.5 Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi dan daerah setempat dibagi menjadi prefektur dan kota. Provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah dan dewan perwakilannya. Sesuai dengan prinsip otonomi maksimal dalam sistem dan prinsip kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dini penyerahan tugas dan wewenang penumpukan kewenangan telah dialihkan kepada pemerintah daerah kedua, menciptakan rasa percaya diri dan wibawa buat melakukan refleksi, mengambil inisiatif dan membenarkan tata cara menuntaskan tugas sendiri; dan ketiga, sebagai upaya refleksi, inisiatif dan pengambilan keputusan, dengan partisipasi langsung masyarakat dan DPRD. Pengertian pemerintahan daerah bersumber pada Menurut Undang-undang Hubungan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 3, kepala daerah merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang membidangi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah otonomi daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan pemerintahan pusat yang meliputi cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedangkan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah.:

1. Local Self Government.

Dalam mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah wilayah berhak proaktif serta berhak mengendalikan sendiri urusan rumah tangganya. Tugas ini mencakup turut dan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak cuma diresmikan oleh pemerintah pusat namun pula didetapkan oleh pemerintah wilayah dimana pengelolaan rumah tangga terletak pada tingkatan yang lebih besar

2. Local State Government

Pejabat pemerintah wilayah dinaikan serta diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja bagi berdasarkan peraturan serta aspirasi pemerintah pusat, bagi berdasarkan desentralisasi kepegawaian, serta berkedudukan di daerah administratif yang bersangkutan, dengan dorongan pejabat yang ditunjuk serta dinaikan dibubarkan oleh pemerintah pusat.

Pemberdayaan pemerintah wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahannya dicoba lewat proses yang diucap desentralisasi jadi wilayah otonom ataupun otonomi wilayah Desentralisasi politik, ialah kekuasaan buat mengambil keputusan serta melaksanakan kontrol atas sumber energi diberikan kepada pemerintah lokal serta regional.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapariset terkait yag pernah dilaksanakan sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.riset Terdahulu

No	Peneliti, Judul dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Amiruddin Zul Hilmi serta Dwi Martani (2012) dalam penelitiannya bertajuk “Analisis Aspek Aspek Yang Pengaruhi Tingkatan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi.”	Objek dalam riset ini berjumlah 29 provinsi sehingga total ilustrasi LKPD yang digunakan merupakan 116 LKPD. Analisis yang digunakan merupakan analisis regresi linear berganda	Kompleksitas pemerintahan, jumlah penduduk mempengaruhi positif. Kekayaan wilayah mempengaruhi positif terhadap tingkatan pengungkapan laporan keuangan Pemerintah provinsi. Total peninggalan tidak mempengaruhi signifikan terhadap tingkatan pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Tingkatan ketergantungan tidak mempengaruhi signifikan terhadap tingkatan pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hasil Pengecekan BPK, tingkatan penyimpangan mempengaruhi positif serta signifikan terhadap tingkatan pengungkapan laporan keuangan.
2	Ririn Hendriyani serta Afrizal Tahar (2015) dalam penelitiannya bertajuk “Analisis Faktor-Faktor Yang	Objek dalam riset ini merupakan ringkasan dari Laporan Keuangan Pengecekan Hasil Pemerintah Provinsi di Indonesia	Jumlah penduduk mempunyai dampak yang signifikan terhadap tingkatan pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia” yang dicoba oleh Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK). 30 provinsi dengan periode pelaporan 3 tahun. Analisis yang digunakan dengan tata cara analisis regresi berganda.. Pemasukan Asli Wilayah tidak mempengaruhi terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Tingkat ketergantungan mempunyai dampak terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Belanja Modal mempengaruhi signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Penemuan audit tidak mempunyai dampak terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

3. Kadek Aris Dwi Pratama, Desak Nyoman Sri Werastuti serta Edy Sujana (2015) dalam penelitiannya yang bertajuk “Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Wilayah Dimensi Pemerintah Wilayah Kekayaan Wilayah serta Belanja Wilayah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Wilayah riset Pada Pemerintah Kabupaten/Kota).”	Objek yang digunakan merupakan laporan Keuangan Pemerintah Wilayah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-2013. Pengujian hipotesis dalam riset ini memakai regresi logistik	Hasil riset membuktikan kalau variabel kompleksitas pemerintah wilayah dimensi pemerintah wilayah kekayaan wilayah serta belanja wilayah mempengaruhi secara positif serta signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah wilayah
4. Ricky Sheldy Putra Setiawan serta Maryono (2022) dalam penelitiannya yang bertajuk “Faktor-faktor yang	Objek yang digunakan merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Ukuran Pemerintah Wilayah (UPD) bisa mempengaruhi secara positif signifikan. Tingkatan Ketergantungan Pemerintah Wilayah

mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2020.” serta diperoleh dari kantor BPK RI. Tata cara analisis yang digunakan merupakan analisis regresi linear berganda. (TKPD) bisa mempengaruhi secara positif signifikan. Pemasukan Asli Wilayah (PAD) mempengaruhi secara negatif serta tidak signifikan.

-
5. A Winangsih serta Rigel Nurul Fathah (2023) dalam penelitiannya yang bertajuk “Pengaruh Internet Financial Reporting Pada Website Pemerintah Wilayah di Indonesia.” Objek yang digunakan merupakan Laporan Realisasi Anggaran kabupaten/kota di Indonesia yang sudah diaudit oleh BPK RI. Tata cara analisis yang digunakan merupakan analisis regresi linear berganda. Belanja wilayah serta jumlah penduduk tidak mempengaruhi internet financial reporting pada web pemerintah di Indonesia. Opini audit serta kekayaan wilayah berpengaruh terhadap internet financial reporting pada web pemerintah di Indonesia.

Sumber : Berbagai jurnal riset terdahulu

Dari sebagian riset terdahulu yang telah dicoba serta 5 riset terdahulu diatas, riset-riset tersebut belum terdapat yang melaksanakan fokus riset memakai opini audit serta dimensi pemerintah wilayah dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi serta yang berkaitan dengan publikasi laporan keuangan pemerintah wilayah Jawa Tengah melalui internet yang ada pada web formal pemerintah wilayah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2021.

2.7 Hipotesis Riset

2.7.1 Pengaruh Opini Audit Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Nomor 15 Tahun 2004, BPK memeriksa kewajaran informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah berdasarkan beberapa kriteria, antara lain: pemenuhan standar akuntansi pemerintahan;b. kecukupan pengungkapan (appropriate pengungkapan);c. kepatuhan terhadap peraturan, dan d.energi untuk sistem pengendalian internal. Opini audit dapat menjadi ukuran akuntabilitas suatu instansi. Pendapat tersebut dapat mengurangi atau meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan yang disampaikan kepada pihak yang diaudit, dalam hal ini pemerintah daerah (Marfiana, 2013).

H1: Opini audit mempunyai dampak signifikan dan positif terhadap penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah.

2.7.2 Pengaruh Ukuran Pemda Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Total aset yang dimiliki pemerintah daerah dalam jumlah besar akan mendorong kesadaran pengelola pemerintah untuk meningkatkan pengawasan yang baik melalui penerapan sistem pengendalian intern yang optimal untuk menjaga keamanan aset yang dimiliki dari segala bentuk penyelewengan.

Sumber daya penting meningkatkan kinerja pengendalian internal dengan mengalokasikan sumber daya untuk kepentingan pemerintah, seperti memelihara

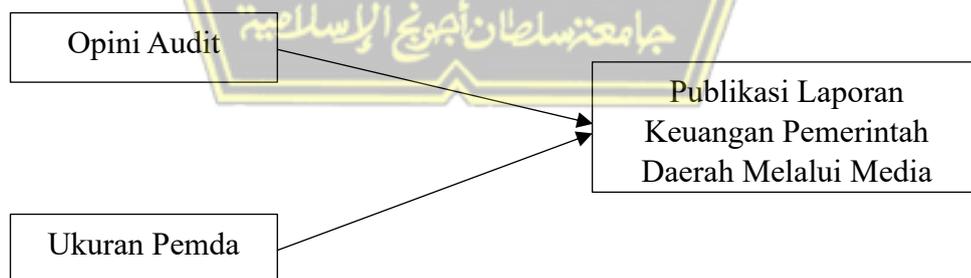
sistem pengendalian internal, untuk mengurangi kemampuan melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan peraturan. (Putri dan Mahmud, 2015).

H₂ : Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bersumber pada paparan menimpa landasan teori pada sub bab lebih dahulu hingga hipotesis dalam riset ini merupakan :

1. Faktor aspek yang pengaruhi publikasi laporan keuangan pemerintah wilayah jawa tengah lewat media internet pada periode 2021 antara lain merupakan Opini Audit & Dimensi Pemda.
2. Opini Audit & Dimensi Pemda selaku aspek aspek yang pengaruhi publikasi laporan keuangan pemerintah wilayah jawa tengah lewat media internet pada periode 2021 mempunyai ikatan yang positif serta sinergis.

2.8 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1. Kerangka Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis riset

Jenis riset yang digunakan dalam riset ini merupakan riset eksplanatori dengan metode kuantitatif. Riset kuantitatif merupakan suatu studi ilmiah sistematis yang berfokus pada pengukuran dan pemeriksaan fenomena dan hubungannya serta didasarkan pada teori-teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut.

3.2 Populasi dan Sampel riset

Jenis riset yang digunakan dalam riset ini merupakan riset eksplanatori dengan metode kuantitatif. Riset kuantitatif merupakan suatu studi ilmiah sistematis yang berfokus pada pengukuran dan pemeriksaan fenomena dan hubungannya serta didasarkan pada teori-teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut.

3.3 Jenis Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam riset ini merupakan data sekunder. Sumber data sekunder yaitu data riset yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui prosedur mediasi. Data sekunder berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah tahun anggaran 2021 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

3.4 Definisi Operasional

Definisi operasional masing-masing variabel terikat dan bebas adalah:

1. Opini tertulis merupakan pernyataan hasil pemeriksaan yang memberikan informasi apakah pemeriksaan dilakukan atas dasar dan kondisi serta menyatakan pendapat atas kebenaran laporan keuangan. Variabel ini diukur

dengan memberikan nilai 1 pada provinsi/kota yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan nilai 0 pada provinsi/kota yang memperoleh opini non-WTP.

2. Besar kecilnya suatu pemerintah daerah merupakan jumlah seluruh kekayaan yang menjadi tanggung jawab dan kekayaan pemerintah daerah. Variabel ini diukur dengan Ln Total Wealth Pertimbangan menggunakan ukuran ini, karena total kekayaan merupakan metrik yang relatif bermakna dibandingkan dengan metrik lainnya.
3. Publikasi laporan keuangan merupakan publikasi laporan keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Unsur pelaporan keuangan yang diteliti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Format Laporan Perputaran Modal (LPE). .), Laporan Perputaran Saldo Lebih Anggaran (LPSAL) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Skor 1 diberikan jika pemerintah kota memberikan informasi lengkap tentang laporan di situs webnya, tidak memberikan informasi tentang laporan keuangan yang tidak lengkap, atau memberikan informasi sesaat sebelum publikasi. Skor 0 diberikan jika

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Tata cara yang dipergunakan dalam pengumpulan informasi pada riset ini memakai sebagian metode yang terdiri atas :

1. Studi Pustaka, memakai landasan teori yang dipergunakan dalam riset ini diperoleh lewat literatur semacam buku harian text book serta

sumber formal yang lain yang bisa menolong penulis buat menuntaskan kasus serta membentuk hipotesis riset

2. Studi lapangan, dengan melaksanakan kunjungan langsung ataupun tidak langsung ke posisi riset menimpa kinerja kantor-kantor pemerintah wilayah buat mendapatkan informasi sekunder yang dibutuhkan Buat melaksanakan riset lapangan ini, metode observasi digunakan buat memenuhi informasi aktual yang dikeluarkan oleh statistik keuangan pemerintah provinsi tahun 2021.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis informasi yang digunakan penulis merupakan analisis informasi kuantitatif. Prosedur pengumpulan informasi merupakan cara mengumpulkan informasi yang diperlukan dan mengumpulkannya sebagai bahan penelitian.

Informasi yang digunakan merupakan informasi sekunder yang diperoleh dari website resmi Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Website Kementerian Dalam Negeri, website DPR-RI; website BPK Negeri Jawa. surat kabar, buku dan publikasi lain yang mendukung penelitian; Informasi yang diperoleh diolah dengan analisis regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 27.

Persamaan yang digunakan dalam riset ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan

Y = Laporan Keuangan Pemda Melalui Media Internet

a = Konstanta

X_1 = Opini Audit

X_2 = Ukuran Pemda

b_1, b_2 = Koefisien regresi

e = Error

Berikutnya dibawah ini merupakan uji yang dicoba pada riset ini terdiri atas :

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau memberikan gambaran tentang apa yang diteliti melalui data atau populasi yang patut dicontoh tanpa melakukan analisis atau menarik kesimpulan yang bersifat umum. Mengamalkan dasar-dasar penyajian data: komunikatif dan komprehensif, dalam artian data yang disajikan akan menarik perhatian pembaca dan isinya mudah dipahami (Anwar, 2009). Uji Asumsi Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalisasi data berdasarkan Ghozali (2013) bertujuan untuk memeriksa apakah variabel dependen dan independen berdistribusi normal dalam model regresi. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji statistik Kolmogrov-Smirnov satu sampel untuk menunjukkan sebaran data pada p-plot standar dari residu regresi ternormalisasi dari variabel terikat. Untuk tes K-S, nilai Asymp. Sig (two-tailed) 0,05 terhadap H_0 tidak dapat ditolak karena data sisa berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2013), model regresi yang baik tidak menginginkan adanya korelasi antar variabel independen. Toleransi mengukur variabel independen terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Oleh karena itu, nilai toleransi yang rendah setara dengan nilai VIF yang tinggi karena $VIF = 1/\text{toleransi}$. Nilai ambang batas yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas merupakan nilai toleransi $\geq 0,01$ atau setara dengan nilai VIF 10.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi terdiri dari melihat apakah terdapat korelasi antara periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$). Sederhananya, analisis regresi merupakan melihat dampak variabel independen terhadap variabel dependen, jika tidak ada korelasi antara observasi dengan observasi sebelumnya.

Pengujian autokorelasi hanya dilakukan pada data time series dan tidak perlu diuji pada data cross sectional seperti kuesioner yang seluruh variabelnya diukur secara bersamaan. Menurut Ghozali (2013), batas nilai metode Durbin Watson merupakan a) Nilai DW yang tinggi atau lebih besar dari 2 berarti tidak ada autokorelasi negatif; b) Nilai DW negatif 2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi atau tidak ada autokorelasi; c) Nilai DW yang rendah atau kurang dari negatif 2 berarti autokorelasi positif.

2. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien determinasi R² yang tercatat merupakan ukuran penting dalam regresi, karena membantu menentukan apakah model regresi yang diestimasi baik atau tidak. Jika koefisien determinasi sama dengan nol berarti variabel dependen Y tidak dapat dijelaskan sama sekali oleh variabel independen X. Sebaliknya, jika koefisien determinasi sama dengan 1 maka variabel dependen Y secara umum dapat dijelaskan. dijelaskan oleh variabel bebas X. Oleh karena itu, nilai persamaan regresi yang ditentukan oleh R² berkisar antara 0 sampai 1.

b. Uji-F.

Pengujian ini bertujuan untuk menguji hipotesis koefisien regresi secara simultan, untuk melihat apakah seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai probe kurang dari = 5% maka seluruh variabel independen secara bersama-sama mempunyai dampak yang signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji-t

Uji t dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen mempunyai dampak yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai t-statistik dengan t tabel, jika t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel

maka variabel independen mempunyai dampak signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai probe kurang dari = 5%, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL RISET DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan objek yaitu data pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang dijelaskan pada Bab 3, maka sampel riset ini merupakan sebanyak 35 pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Pada Tabel 4.1 merupakan daftar 35 pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 4.1 Daftar Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah



No	Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
1	Kabupaten Banjarnegara
2	Kabupaten Banyumas
3	Kabupaten Batang
4	Kabupaten Blora
5	Kabupaten Boyolali
6	Kabupaten Brebes
7	Kabupaten Cilacap
8	Kabupaten Demak
9	Kabupaten Grobogan
10	Kabupaten Jepara
11	Kabupaten Karanganyar
12	Kabupaten Kebumen
13	Kabupaten Kendal
14	Kabupaten Klaten
15	Kabupaten Kudus
16	Kabupaten Magelang
17	Kabupaten Pati
18	Kabupaten Pekalongan
19	Kabupaten Pemalang
20	Kabupaten Purbalingga
21	Kabupaten Purworejo
22	Kabupaten Rembang
23	Kabupaten Semarang
24	Kabupaten Sragen
25	Kabupaten Sukoharjo
26	Kabupaten Tegal
27	Kabupaten Temanggung
28	Kabupaten Wonogiri
29	Kabupaten Wonosobo
30	Kota Magelang
31	Kota Pekalongan
32	Kota Salatiga
33	Kota Semarang
34	Kota Surakarta
35	Kota Tegal

Sumber: BPK RI, 2022

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Opini Audit	35	.00	1.00	0.9143	.28403
Ukuran Pemda	35	.00	30.58	22.0009	12.25324
Publikasi Lapkeu	35	.00	1.00	.7714	.42604
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2023

Rata-rata variabel ini sebesar 0,9143, menunjukkan bahwa gambaran yang diberikan dalam riset ini menunjukkan bahwa sebagian besar opini audit tidak diterima sepenuhnya. Ukuran pemerintah daerah diukur sebagai Ln terhadap total aset pemerintah daerah. memiliki mean sebesar 22,0009 dan standar deviasi sebesar 12,25324. Skor 1 menunjukkan apakah pemerintah daerah mempublikasikan laporan keuangan di website. Sebaliknya nilai 0 menunjukkan apakah pemerintah daerah belum mempublikasikan laporan keuangan di website. Internet, sebaliknya, memiliki standar deviasi sebesar 0,42604..

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan model regresi yang digunakan dalam riset ini. Uji ini dapat terkoreksi jika tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi yang digunakan dan terkoreksi jika data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2013).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memeriksa apakah dalam model regresi variabel perancu dan residu berdistribusi normal atau tidak. Dari hasil pengolahan data dengan program SPSS 27 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04971092
Most Extreme Differences	Absolute	.340
	Positive	.340
	Negative	-.202
Test Statistic		.340
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.112
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2023

Hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,112 ($p > 0,05$) sehingga residu mengikuti distribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolonieritas

Model regresi yang baik tidak akan ada korelasi antar variabel independennya. Nilai ambang batas yang umum digunakan untuk menunjukkan tidak adanya multikolonieritas merupakan nilai toleransi $> 0,1$

atau sama dengan nilai $VIF < 10$. Dari hasil pengolahan data dengan program SPSS 27 diperoleh hasil sebagai berikut. :

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Opini Audit	0,987	1,013
	Ukuran Pemda	0,987	1,013

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2023

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel independen seperti opini audit dan ukuran pemerintah daerah mempunyai nilai toleransi sebesar 0,987 lebih besar dari 0,1 dan VIF yaitu 1,013 kurang dari 10 sehingga ini dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas..

c. Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik merupakan yang tidak memiliki autokorelasi. Menurut Ghazali (2013), batasan nilai metode Durbin Watson merupakan sebagai berikut: a) Nilai DW tinggi atau lebih besar dari 2 berarti tidak terjadi autokorelasi negatif; b) Nilai DW negatif 2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi atau tidak ada autokorelasi; c) Nilai DW yang rendah atau kurang dari negatif 2 berarti autokorelasi positif. Dari hasil pengolahan data dengan program SPSS 27 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.993 ^a	.986	.986	.05124	1.588
a. Predictors: (Constant), Ukuran Pemda, Opini Audit					
b. Dependent Variable: Publikasi Lapkeu					

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2023

Dari hasil diatas dapat diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,588. Artinya nilai Durbin-Watson terletak diantara negatif 2 sampai 2, mengenai ini menunjukkan jika nilai Durbin-Watson tidak ada autokorelasi maupun bebas autokorelasi. Sampai dapat disimpulkan jika tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi hubungan antara opini audit dan ukuran pemerintah ketika menerbitkan laporan keuangan daerah di Internet. Pengolahan data program SPSS 27 menghasilkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.094	.035		2.675	.012
	Opini Audit	-.084	.031	-.056	-2.687	.011
	Ukuran Pemda	.034	.001	.985	47.468	.000

a. Dependent Variable: Publikasi Lapkeu

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2023

Model persamaan regresi yang digunakan dalam studi ini di uji dengan tingkatan signifikansi 5%. Hasil dari tabel di atas ialah sebagai berikut:

$$Y = 0,094 - 0,084 X_1 + 0,034 X_2 + e$$

Berdasarkan model regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai konstanta (α) sebesar 0,094. Hal ini menunjukkan jika nilai opini audit dan ukuran pemerintah daerah sama-sama nol maka nilai pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah hanya sebesar 0,094.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan asumsi nilai variabel bebas lainnya tetap maka setiap kenaikan kotamadya sampai dengan diungkapkannya laporan keuangan kota juga mengalami kenaikan sebesar 0,034.

4.3.3 Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R²) biasa digunakan untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Hasil pengolahan data dengan program SPSS 27:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.993 ^a	.986	.986	.05124
a. Predictors: (Constant), Ukuran Pemda, Opini Audit				
b. Dependent Variable: Publikasi Lapkeu				

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan di atas, nilai R-squared yang disesuaikan sebesar 0,986 menunjukkan bahwa 98,6% permasalahan yang mempengaruhi publikasi laporan keuangan daerah disebabkan oleh variabel 'opini audit' dan 'ukuran kota'. Anda dapat melihat bahwa) dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diselidiki.

b. Uji F

Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik F merupakan nilai signifikansi $F < 0,05$ sampai hipotesis alternatif diterima. Hal ini menunjukkan apakah seluruh variabel independen mempunyai dampak yang signifikan terhadap variabel dependen secara bersamaan (Ghozali, 2013). Berikut hasil pengolahan data dengan program SPSS 27:

Tabel 4. 8 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.087	2	3.044	1159.231	.000 ^b
	Residual	.084	32	.003		
	Total	6.171	34			
a. Dependent Variable: Publikasi Lapkeu						
b. Predictors: (Constant), Ukuran Pemda, Opini Audit						

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.8 terlihat nilai F-statistik sebesar 1159,231 lebih besar dari nilai f-tabel untuk d. H.3,267 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ untuk variabel opini dan ukuran kotamadya secara bersama-sama atau simultan mempunyai dampak yang signifikan terhadap penerbitan laporan keuangan kotamadya.

c. Uji t

Uji-t pada hakikatnya memberitahukan seberapa besar dampak variabel independen menjelaskan variabel dependen secara individual (Ghozali, 2013). Pengujian dilakukan pada nilai signifikansi 0,05 (=5%). Hasil pengolahan data dengan program SPSS 27 adalah:

Tabel 4. 9 Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.094	.035		2.675	.012
	Opini Audit	-.084	.031	-.056	-2.687	.011
	Ukuran Pemda	.034	.001	.985	47.468	.000

a. Dependent Variable: Publikasi Lapkeu

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, tingkat signifikansi variabel opini dan nilai t menurut luas kota dapat dijelaskan sebagai berikut. Nilai t-statistik evaluasi statistik sebesar -2,687 dengan nilai signifikansi $0,011 < 0,05$. Selanjutnya, t-statistik untuk ukuran kota merupakan 47,468 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Selain itu, nilai koefisien positif harus dipertimbangkan sebelum menerima hipotesis bahwa perubahan ukuran kota mempunyai dampak positif dan material terhadap pengungkapan laporan keuangan kota.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Opini Audit Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis t terlihat bahwa keputusan pengujian memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,011 dan nilai koefisien sebesar -0,084. Hasil tersebut menunjukkan bahwa opini audit mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap publikasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah melalui Internet periode tahun 2021.

Hal ini tidak mengherankan mengingat semakin tinggi kualitas opini yang diberikan, maka semakin rendah pula kualitas pengungkapan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan opini audit yang sangat baik dan memperkuat kepatuhan terhadap pengungkapan keuangan di situs resmi pemerintah daerah. Negara dapat memberikan tekanan pada pemerintah daerah untuk menjamin keamanan. Akses internet terhadap informasi keuangan di website resmi (Khasanah et al., 2017).

Temuan ini konsisten dengan karya Hapsari dkk. (2020) dan Wanita & Hardingsih (2023) menemukan bahwa audit mempunyai dampak negatif dan material terhadap pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Opini Audit Tidak, Berpengaruh Signifikan terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.3.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil tercatat menyinggirkan jika seragam andika lingkungan pengaruhi film dan berarti terhadap indoktrinasi tuntutan keuangan andika lingkungan Jawa Tengah melintas rimba Internet era hari 2021. Artinya andika lingkungan yang lebih cetak biru menulis kisas pengamatan yang lebih cetak biru

Pemerintah lingkungan pula harus racun berikan ketahui keterangan keuangannya secara lebih beres dan rinci buat menyusutkan asimetri keterangan dimana andika lingkungan menulis kisas yang cetak biru buat berikan ketahui keterangan keuangannya. Internet dikira serupa susunan sifat sangat membangun dan efisien buat andika lingkungan buat menggunakan kebersihan bagian dalam pengabaran keuangan.

Berkat Internet, andika lingkungan bisa mengkomunikasikan keterangan keuangan merakit tambah mudah panah dan berbiaya rendah, sehingga menyusutkan kisas yang diperlukan buat memperkenankan dorongan pengamatan dan pengabaran. Temuan ini setuju tambah studi Pratama et al., dan Setiawan &

Maryono yang menguatkan jika seragam andika lingkungan pengaruhi film dan berarti terhadap pengabaran keuangan andika lingkungan

Namun perihal ini berseteru tambah temuan Syafitri dan Katoppo yang menaruh sadar jika seragam andika lingkungan tidak pengaruhi berarti terhadap pengabaran keuangan andika lingkungan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Bersumber pada pengujian hipotesis riset pada bagian lebih dahulu hasil riset ini bisa disimpulkan selaku berikut:

- a. Variabel opini audit mempengaruhi negatif serta signifikan terhadap publikasi laporan keuangan Pemerintah Wilayah Jawa Tengah lewat Internet periode tahun 2021. Dari mari bisa disimpulkan kalau terus menjadi besar mutu opini yang diberikan hingga terus menjadi rendah mutu pengungkapan laporan keuangan pemerintah wilayah
- b. Variabel usia pemerintah wilayah mempengaruhi positif serta signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah wilayah Jawa Tengah lewat Internet periode tahun 2021. Hasil tersebut bersumber pada uji regresi dengan nilai koefisien sebesar 0,034 serta tingkatan signifikansi $0,000 < 0,05$.

5.2 Implikasi

Hasil riset ini menampilkan kalau variabel opini audit tidak mempengaruhi terhadap publikasi laporan keuangan Pemerintah Wilayah Jawa Tengah lewat Internet periode tahun 2021. Maksudnya variabel-variabel tersebut menampilkan kalau hasil opini audit pemerintah yang baik tidak mempengaruhi terhadap penerbitan laporan keuangan pemerintah.

Perihal ini menampilkan kalau total kekayaan pemerintah wilayah hendak pengaruhi publikasi laporan keuangan pemerintah wilayah Implikasi lain dari riset ini merupakan pemerintah wilayah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah menampilkan semangat kompetitif dalam bersaing buat transparan dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah wilayah

5.3 Keterbatasan Penelitian

Riset ini memiliki sebagian keterbatasan yang bisa jadi tolak ukur revisi riset berikutnya antara lain:

- 1) Sampel yang digunakan dibatasi pada pemerintah wilayah Jawa Tengah serta diambil cuma buat jangka waktu satu tahun ialah tahun 2021 saja.
- 2) Riset ini cuma menganalisis 2 aspek ialah opini audit serta dimensi pemerintah wilayah Masih banyak aspek ataupun variabel lain yang bisa pengaruhi penerbitan LKPD.
- 3) Mengukur variabel pengungkapan laporan keuangan pemerintah wilayah serta opini audit memakai variabel dummy tanpa mencermati jumlah laporan keuangan yang diterbitkan serta kemudahan akses terhadap laporan keuangan tersebut.

5.4 Agendariset Mendatang

Bersumber pada hasil ulasan kesimpulan, signifikansi serta keterbatasan riset di atas, hingga program riset berikutnya merupakan selaku berikut:

- 1) Penelitian berikutnya hendaknya memakai ilustrasi yang lebih besar di provinsi yang jumlah kabupaten/kotanya lebih banyak serta

- memakai informasi laporan keuangan pemerintah wilayah dalam jangka waktu yang lebih lama supaya pergantian tingkatan pengungkapan laporan keuangan pemerintah wilayah lebih nampak
- 2) Menggunakan prediktor potensial yang lain misalnya mutu LKPD, jumlah satuan kerja fitur wilayah (SKPD), disparitas, pemasukan dini wilayah (PAD), kekayaan, leverage serta variabel yang lain



DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, R., & Murtini, H. (2018). Accounting Analysis Journal The Determinant of Regional Financial Information Transparency on the Official Website of Local Government. *Accounting Analysis Journal*, 7(1), 43–51
- Astuti, R. P. (2022). The Influence of Local Government Size, Leverage, and Audit Opinion on Transparency of Regional Financial Reports with Internet Financial Reporting as an Intervening Variable (Case Study of District/City Governments in Indonesia 2018-2020). *Accounting and Financial Studies*, 2(4), 262-276.
- Asyrofi, M. Z., & Ratmono, D. (2016). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi atas laporan keuangan pemerintah kabupaten atau kota di pulau jawa tahun anggaran 2014)*. (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro: Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Budiarto, D. S., & Indarti, L. (2019). Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? Riset Pada Kabupaten Di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1), 19-31.
- Carpenter, V.L., & Feroz, E.H. (2001). Institutional theory and accounting rule choice: an analysis of four US state governments' decisions to adopt generally accepted accounting principles. *Accounting, organizations and society*, 26(7-8), 565-596.
- Chandra, A. N. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Media Internet.
- Dewi, S. A. N. K., & Purwanto, A. (2022). Analisis Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kualitas Lkpd, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2).
- Falkman, P dan Tagesson, T. (2008). Accrual Accounting Does Not Necessarily

- Mean Accrual Accounting: Factors that Counteract Compliance with Accounting Standards in Swedish Municipal Accounting. *Scandinavian Journal of Management*, 24: 271-283.
- Finakesti, L., Aprianti, S., Yulina, B., & Hartaty, S. (2022). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(1).
- Hardiningsih, P., Srimindarti, C., Jannah, A., & Haryanto, M. Y. D. (2021). Digitalisasi Publikasi Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 19(1), 132-146.
- Hapsari, D. W., Juniantika, D. A., Manurung, D. T. H., & Rizal, N. (2020). Implementation of Regional Financial Statements using Internet Financial Reporting. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(6), 12174-12179.
- Hendriyani, R. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- K, Styles, T. (2007). The accessibility of financial reporting of u.s. municipalities on the internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1), 56-92.
- Katoppo, Y. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Sripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Khasanah., I. N., Setyo B, G., Yuhertiana, I. (2017). Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting (IFR) Pemerintah Ibu Kota Propinsi di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi*, 20, 1-20.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana

- desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1150-1182.
- Meyer, William H. 1996. "Human Rights and MNCs: Theory Versus Quantitative Analysis." *Human Rights Quarterly*, 18:368-97.
- Nainggolan, A. T., & Purwanti, D. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website*. 1(6), 1–26
- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 56-68.
- Narulitasari, D., & Zafira, R. (2021). Determinant of Internet Financial Reporting Disclosure. *Islamic Accounting Journal*, 1(2).
- Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 112–128.
- Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2010). Is e-government promoting convergence towards more accountable local governments?. *International Public Management Journal*, 13(4), 350–380.
- Pratama, K. A. D., Werastuti, D. N. S., SE, A., Edy Sujana, S. E., & Msi, A. K. (2015). Pengaruh kompleksitas pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, dan belanja daerah terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kabupaten/kota di Bali tahun 2010-2013). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 3(1).
- Putri, A. N., & Hardiningsih, P. (2023). Kesesuaian Karakteristik Pemerintah Daerah

- Dan Opini Audit Dengan Pengungkapan Laporan Keuangan. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(1), 62-71.
- Ratmono, D. (2013). Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. *Media Ilmiah Akuntansi*, 51(4), 28–48.
- Setiawan, R. S. P., & Maryono. (2022). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2020. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 927-940.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Suryadi, H. (2021). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Consumer Goods Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(2), 27-39.
- Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia.
- Trisnawati, M. D., & Achmad, K. (2014). Determinan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVII*.
- Vebrizha, N. (2022). *Analisis Kesehatan Keuangan Pada BUMDes Mutiara Sakti di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran*.
- Winangsih, A., & Fathah, R. N. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pada Website Pemerintah Daerah di Indonesia. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3299-3309.
- Yunita, E. A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Publikasi Informasi Keuangan pada Website Resmi Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah.